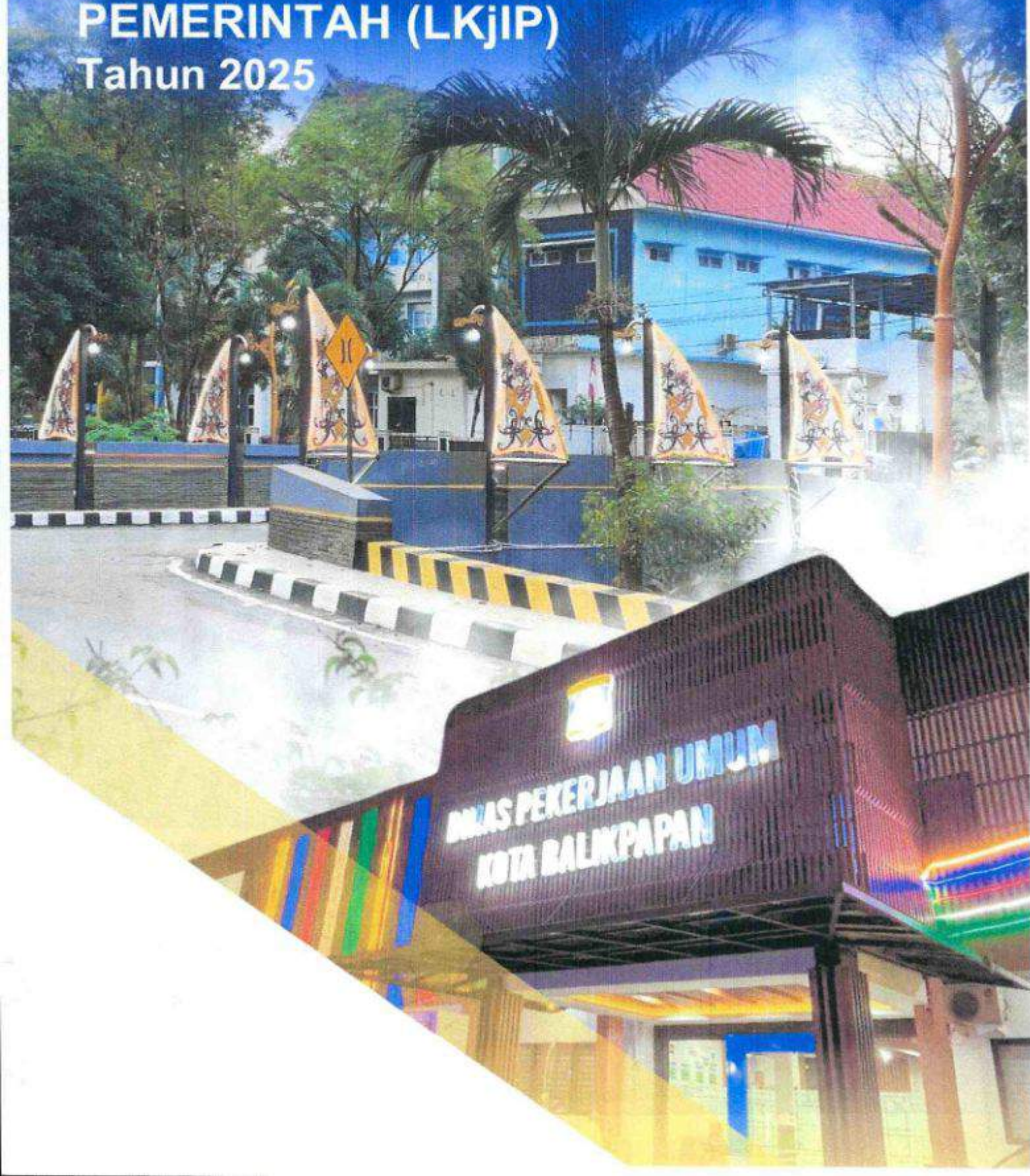




Pemerintah Kota Balikpapan
Dinas Pekerjaan Umum

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat menyelesaikan yang berjudul: **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025”**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik (PERPRES) Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas mengharuskan setiap kegiatan dan hasil penyelenggaraan Negara dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam pembangunan infrastruktur, asas ini berarti pelaksana wajib melaporkan kinerja secara akurat dan jujur kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

Laporan kinerja ini disusun untuk menjelaskan dan menerangkan realisasi anggaran belanja aparat dan publik serta mencerminkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Disamping sebagai dokumen yang berisi hasil kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Balikpapan Tahun 2025, bantuan keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025, laporan ini diharapkan menjadi referensi utama dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Balikpapan



[Handwritten signature]
Ir. RITA, S.T., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sesuai target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta mendukung *clean government* dan *good governance*, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik (PERPRES) Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Matrik Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis serta 7 (tujuh) Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air** dengan indikator **Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air**” melalui “Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)” memiliki realisasi capaian 74,43 % sehingga termasuk kategori capaian “Tidak Tercapai”.
2. Capaian Sasaran Strategis **“Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir** dengan indikator **Persentase penurunan luas genangan banjir**” melalui “Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase” memiliki realisasi capaian 105,10 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
3. Capaian Sasaran Strategis **”Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan** dengan indikator **Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik**” melalui 3 (tiga) “Program

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah” memiliki realisasi capaian 97,18% sehingga termasuk kategori “Tidak Tercapai”

4. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan** dengan indikator **persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik**” melalui 2 (dua) “Program Pengembangan Permukiman dan Program Penyelenggaraan Jalan” memiliki realisasi capaian 104,47% sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
5. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung** dengan indikator **Jumlah Bangunan yang memiliki SLF**” melalui “Program Penataan Bangunan Gedung” memiliki realisasi capaian 140,65 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
6. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi** dengan indikator **persentase pelayanan Jasa konstruksi**” melalui “Program Pengembangan Jasa Konstruksi” memiliki realisasi capaian 103,32 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
7. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dengan indikator **Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum**” dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum melalui “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” memiliki realisasi capaian 100,12% sehingga termasuk kategori “Melebihi Target”.

Sedangkan untuk Matrik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis serta 7 (Tujuh) Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase** dengan indikator **Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**” melalui 2 (dua)

“Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase” memiliki realisasi capaian 100% sehingga termasuk kategori capaian “Tercapai/Sesuai Target”.

2. Capaian Sasaran Strategis ” **Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum**” melalui 2 (dua) indikator yaitu :
 - a. **“Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota”** melalui “Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum” memiliki realisasi capaian 100,06% sehingga termasuk kategori “Melebihi Target”
 - b. **“Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan”** melalui 2 (dua) “Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah” memiliki realisasi capaian 99,98% sehingga termasuk kategori “Tidak Tercapai”
3. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan** dengan indikator **Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota**” melalui “Program Penyelenggaraan Jalan” memiliki realisasi capaian 100,75 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
4. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung** dengan indikator **Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi**” melalui “Program Penataan Bangunan Gedung” memiliki realisasi capaian 100,31% sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
5. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi**” melalui “Program Pengembangan Jasa Konstruksi” memiliki realisasi capaian 101,57 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
6. Capaian Sasaran Strategis **“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**” dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum melalui “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”

memiliki realisasi capaian 100 % sehingga termasuk kategori “Tercapai/Sesuai Target”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 khususnya Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian pada 7 (Tujuh) indikator sasaran yang diukur berdasarkan Hasil Evaluasi LKJIP dan Survei Kepuasan Masyarakat yaitu 2 (dua) indikator tidak tercapai dan 5 (lima) indikator melebihi target.

Sedangkan pencapaian target kinerja dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 khususnya Tahun Anggaran 2025 yang diukur berdasarkan Hasil Evaluasi LKJIP menunjukkan capaian 2 (dua) indikator tercapai/sesuai target dan 4 (empat) indikator melebihi target dan 1 (satu) indikator yang tidak tercapai. Demikian, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik berdasarkan indikator tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	10
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Landasan Hukum	12
1.3 Maksud dan Tujuan.....	13
1.4 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum	13
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	22
1.6 Sistematika Penulisan	25
BAB II PERENCANAAN KERJA.....	27
2.1 Perencanaan Strategis	27
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	42
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	64
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	64
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	67
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	68
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	71

3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	78
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).....	84
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	88
3.2.6	Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	107
3.2.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	135
6.3	Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	145
BAB IV PENUTUP		151

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029	30
Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	31
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025.....	43
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029	45
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025.....	49
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	50
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025	53
Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	64
Tabel 3. 2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025	65
Tabel 3. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja	67
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	68
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.....	69
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	72
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan	

Umum Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	76
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026	78
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029	81
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)/ Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kiner	84
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)/ Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kiner	85
Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025/ Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026	89
Tabel 3. 13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	108
Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum	135
Tabel 3. 15 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Pekerjaan Umum menurut tingkat pendidikan	137
Tabel 3. 16 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai	137
Tabel 3. 17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2025	140
Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2025	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan....	22
Gambar 2.1	Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025	63
Gambar 3. 1	Bendali Telaga Sari	128
Gambar 3. 2	Saluran Sekunder Inhutani	128
Gambar 3. 3	Pengerukan Sedimen Saluran/Normalisasi	129
Gambar 3. 4	Pembangunan SPALDS Hibah Masyarakat	130
Gambar 3. 5	Jl. Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman	131
Gambar 3. 6	Pembangunan Gedung Gabungan DP3 dan Disdag.....	133
Gambar 3. 7	Dokumentasi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2025.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Untuk itu, laporan kinerja akan diuraikan pencapaian kinerja suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berkewajiban menyusun LKJIP Tahun 2025 untuk diserahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat - lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKJIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar **Rp. 958.649.597.732,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Perubahan sebesar **Rp. 1.050.008.972.287,- (Satu Triliyun Lima Puluh Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** untuk mewujudkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yaitu Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas. Hal tersebut didukung melalui perwujudan 7 (tujuh) indikator sasaran strategis serta pelaksanaan 10 (sepuluh) program oleh 4 (empat) bidang organisasi, sekretariat dan UPTD pendukung.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah karena kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun merupakan permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan yang akan dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

1.2 Landasan Hukum

Berikut adalah dasar hukum pembuatan laporan kinerja ini antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021 – 2025;
8. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 34 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ini dimaksudkan sebagai: “Bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025”. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan selama Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 sehingga dapat diberikan masukan atau saran untuk memperbaiki kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di masa depan.
- c. Untuk mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pekerjaan Umum, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum seperti perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasandan pembinaan di bidang

sumber daya air dan drainase, jalan dan jembatan, bangunan gedung pemerintah, penyehatan lingkungan permukiman serta tugas bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 01 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan di bidang pekerjaan umum;
- d. Pelaksanaan analisis kelayakan sarana prasarana dan pengelolaan data infrastruktur di bidang pekerjaan umum;
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
- f. Penyelenggaraan pemberian saran teknis dan/atau layanan rekomendasi/perizinan bidang pekerjaan umum;
- g. Pembinaan teknis bidang pekerjaan umum;
- h. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non-perizinan bidang pekerjaan umum;
- i. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang pekerjaan umum;
- j. Pembinaan dan pengendalian UPT; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, berikut struktur Dinas Pekerjaan Umum ditunjang dengan rincian tugas dan fungsi antara lain :

A. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas antara lain:

- a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan fungsi meliputi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- c. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, perbaikan dan pemantauan di bidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan analisis kelayakan sarana prasarana dan pengelolaan data infrastruktur di bidang pekerjaan umum;
- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pekerjaan umum;
- f. penyelenggaraan pemberian saran teknis dan/atau layanan rekomendasi/perizinan bidang pekerjaan umum;
- g. pembinaan teknis bidang pekerjaan umum;
- h. pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum;
- i. pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang pekerjaan umum;
- j. pembinaan dan pengendalian UPTD;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan kegiatan;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;

- c. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja;
- d. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- e. melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- f. melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan administrasi perlengkapan dan aset;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan UPTD;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, administrasi kantor, kearsipan, keprotokolan, perpustakaan;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan anggaran;
- f. pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran;
- g. koordinasi bidang, UPTD;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase

Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Sumber Daya Air dan Drainase. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan program pengelolaan sumber daya air serta program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
- b. penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, konstruksi air tanah dan air baku, konstruksi pengendali banjir, drainase utama perkotaan dan bangunan pengaman pantai, konstruksi irigasi dan rawa;
- c. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis, supervisi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan;
- d. penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis, supervisi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta penyediaan sarana sistem drainase lingkungan;
- e. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan kualitas air;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air;
- g. pembinaan, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan pembinaan teknis sistem drainase perkotaan dan lingkungan;
- h. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan konservasi serta pemeliharaan kawasan rawa;
- i. penyusunan outline plan pada kawasan genangan;
- j. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) wilayah Daerah;

- k. pelaksanaan penyusunan, pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) wilayah Daerah;
- l. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan terkait tugas dan fungsinya.

D. Bidang Jalan dan Jembatan

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan. Bidang Jalan dan Jembatan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kerja Bidang Jalan dan Jembatan;
- b. penyusunan rencana induk sarana, prasarana jalan dan jembatan;
- c. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan pemberian koreksi teknis pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi sarana prasarana jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan survei dan pengkajian pengembangan jaringan jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama/kemitraan antara Pemerintah Daerah/dunia usaha/masyarakat untuk penanganan jalan dan jembatan;
- j. pembinaan peningkatan partisipasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- k. pengendalian rekomendasi/pertimbangan teknis dan dispensasi terkait pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan;
- l. pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan administrasi pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan di Bidang Jalan dan Jembatan;
- m. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah;
- n. pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah;
- q. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Gedung Pemerintah

Bidang Gedung Pemerintah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Gedung Pemerintah. Bidang Gedung Pemerintah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kegiatan Bidang Gedung Pemerintah;
- b. penyusunan rencana induk pengembangan sistem informasi dan kompetensi tenaga ahli di Bidang Gedung Pemerintah;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pertelaan non hunian, dan pengelolaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- d. pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi teknis pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan, bangunan gedung;
- e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;

- f. peningkatan kapasitas teknik dan manajemen peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- g. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelatihan pelaku jasa konstruksi dan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dibidang jasa konstruksi dalam rangka tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa;
- i. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan atau asosiasi jasa konstruksi;
- j. pelaksanaan keijasma konstruksi dalam peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi;
- k. pengendalian rekomendasi teknis pemanfaatan bangunan gedung;
- l. pelaksanaan koordinasi secara aktif terkait bina konstruksi dengan bidang lain dan Dinas Pekerjaan Umum dan/atau instansi lain yang mengampu urusan sektor jasa konstruksi;
- m. pelaksanaan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara;

- n. pelaksanaan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan pelayanan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan di tingkat Daerah;
- p. pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya Daerah;
- q. pelaksanaan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;
- r. pelaksanaan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) bangunan gedung negara;
- s. pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

- t. pelaksanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- u. pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Daerah;
- v. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- w. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- x. pengoordinasian penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- y. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- z. pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Bidang Gedung Pemerintah;
- aa. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- bb. dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- b. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen penyelenggaraan infrastruktur persampahan, dan sistem penyediaan air minum dan air limbah;
- c. penyelenggaraan pembangunan dan perawatan/pemeliharaan infrastruktur persampahan dan sistem penyediaan air minum dan air limbah;
- d. penyusunan dan pengelolaan sistem informasi infrastruktur persampahan, sistem penyediaan air minum dan air limbah;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi infrastruktur persampahan, sistem penyediaan air minum dan air limbah;
- f. pelaksanaan survei dan pengkajian pengembangan infrastruktur persampahan, sistem penyediaan air minum dan air limbah;
- g. pembinaan peningkatan partisipasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur persampahan, sistem penyediaan air minum dan air limbah;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi infrastruktur persampahan, sistem penyediaan air minum dan air limbah dengan pengampu urusan bina konstruksi;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber : Perwali No.01 Tahun 2022

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama **Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan**

Dinas Pekerjaan Umum memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur gedung. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat antara lain: ketahanan air, peningkatan konektivitas jalan serta peningkatan infrastruktur gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum berusaha keras untuk mewujudkan pembangunan situ/embung pada daerah-daerah yang memiliki sumber air diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan minimal sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan seperti pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Balikpapan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah maupun roda perekonomian masyarakat. Maka dari itu, adanya peningkatan konektivitas, harga barang di seluruh wilayah Kota Balikpapan sama rata sehingga masalah kesenjangan dapat dikurangi.

Isu strategis adalah pertanyaan yang luas menyangkut kebijakan atau tantangan kritis yang akan mempengaruhi misi, nilai-nilai yang dianut, atau sasaran layanan sebuah organisasi. Hal ini dapat melibatkan konflik antara satu hal dengan hal lainnya. Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kota Balikpapan maka, isu strategis merupakan pilihan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kota Balikpapan tersebut.

Karakteristik isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal dan eksternal Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan terhadap permasalahan yang bersifat penting, mendasar, berjangka Panjang, mendesak, dan menentukan tujuan di masa depan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu – isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan titik lokasi banjir.
2. Tingkat pemeliharaan dan aksesibilitas jalan masih belum optimal.

3. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan mengakibatkan tidak tercukupinya kapasitas air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum serta pemerataan akses air minum aman melalui layanan air minum perpipaan.
4. Rendahnya akses sanitasi aman untuk mencapai target Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan untuk mendukung konsep *Zero Waste to Landfill* yaitu pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
6. Terdapat beberapa gedung pemerintah dalam kondisi tidak layak atau menyewa seperti Gedung Kelurahan Mekar Sari dan Kecamatan Balikpapan Tengah yang masih menyewa
7. Belum optimalnya pembinaan pemilik dan pengelola gedung tinggi memahami resiko/ancaman bencana pada bangunan bertingkat dikarenakan masih terdapat bangunan yang memiliki izin SLF.
8. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia dan penyedia Jasa Konstruksi

Berdasarkan isu – isu strategis diatas, terdapat permasalahan utama yang menghambat Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam pencapaian kinerja instansi pemerintah antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi tentang jalan serta belum tersusunnya rencana pemeliharaan jalan.
2. Belum terhubungnya Pusat Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kota dengan jaringan jalan seperti Kawasan Industri Kariangau dan Kawasan Perkotaan Balikpapan Timur.
3. Kurang optimalnya kapasitas saluran drainase dan belum terbangunnya Bendungan Pengendali Banjir (Bendali) sesuai dengan Masterplan Drainase.
4. Belum selesainya pembebasan lahan dan pembangunan Embung Aji Raden dan terbatasnya sumber air baku di Kota Balikpapan.
5. Keterbatasan air baku dan masih tingginya tingkat kebocoran.

6. Masih terbatasnya sarana pengolahan air limbah terpusat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang aman.
7. Terbatasnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Manggar dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Konsep pengelolaan 3R belum beroperasi secara optimal, pengelolaan sampah di TPA masih belum menggunakan teknologi yang mampu mereduksi volume sampah dalam jumlah banyak.
8. Tidak terpenuhinya anggaran untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Balikpapan sehingga jumlah titik banjir yang ada di Balikpapan masih ada.
9. Masih terdapat sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
10. Komposisi sumber daya manusia dalam upaya penanganan permasalahan dan memenuhi tantangan pembangunan belum dalam kondisi ideal.
11. Lahan yang belum tersedia atau lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek masih terkendala dengan pembebasannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan pencapaian sasaran dari Renstra, serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian dan disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum, isu strategis, landasan hukum serta uraian singkat sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2025 mengenai visi, misi, dan tujuan yang dicapai, strategi mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program, serta perjanjian kinerja tahun pelaksanaan mengenai rencana pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas dan sesuai dengan anggaran tersedia.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2025 ini serta memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa depan.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

VISI : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

MISI : Menyediakan infrastruktur kota yang memadai

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	77.80	78.20	78.78	79.12	79.55	80.02
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	54,02%	55,79%	57,48%	59,18%	60,87%	62,56%
	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	47,85%	47,25%	46,80%	46,36%	45,92%	45,48%
	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	97,54%	97,85%	97,93%	98,14%	98,31%	98,53%
	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	78,92%	79,95%	81,25%	82,55%	83,76%	84,91%
	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	6	45	65	85	105	125
	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	27,32%	29,12%	30,72%	33,11%	35,51%	37,90%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi : Balikpapan Kota Global, nyaman untuk semua Dalam Bingkai Madinatul Iman.

Misi : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	57,59	58,40	61,68	64,65	67,84	71,26
	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	52,15%	52,37%	52,60%	52,82%	53,03%	53,25%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	94,39%	94,41%	94,45%	94,49%	95,56%	98,21%
		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)	52,73%	53,11%	53,91%	54,97%	56,00%	56,77%
	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	56,69%	56,81%	56,96%	57,10%	57,26%	57,45%
	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	83,85%	83,88%	83,93%	84,01%	84,09%	84,17%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	11,45	13,98	25,40	35,00	45,00	55,00
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	79,58	27	28,75	30,5	32,25	34

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tabel 2.3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Infrastruktur Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	85,25%	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	58,40			
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	45,92%	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	52,37%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Normalisasi/Restorasi Sungai Peningkatan Polder/Kolam Retensi Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. dan Pengaman Pantai Pembangunan Polder/Kolam Retensi Operasi dan Pemeliharaan Polder/ Kolam Retensi
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	45,92%				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
								Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
								Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
								Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
								Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
								Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
								Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	98,31%	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	94,41%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
								Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
								Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)				Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)	53,11%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
								Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
								Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
								Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
								Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	83,85%	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	83,88%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
								Pengawasan Penyelenggaraan Jalan
								Penggantian Jembatan
								Pembangunan Jalan
								Rekonstruksi Jalan
								Pemeliharaan Berkala Jalan
								Pelebaran Jalan Menuju Standar
								Rehabilitasi Jembatan
								Pembangunan Jembatan
								Survey Kondisi Jalan/Jembatan
								Rehabilitasi Jalan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Pemeliharaan Rutin Jembatan
								Pemeliharaan Rutin Jalan
Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	123	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	56,81%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
								Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	35,51%	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	13,98	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi
								Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pekerjaan Umum	32,25	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	79,85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum
							Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
							Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021-2025 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Nomor 188.46/2711/DPU/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 188.46/679/DPU/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Perubahan IKU tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2024 tanggal 27 November 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang merekomendasikan agar seluruh Dinas Pekerjaan Umum di lingkungan Pemkot Balikpapan tidak lagi menggunakan indeks RB sebagai IKU dan menggunakan IKU yang selaras dengan kebijakan Permenpanrb Nomor 3 Tahun 2024.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari Bangunan Waduk , bendungan dan bendali yang merupakan kewenangan kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan+Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota ----- 2	Bidang SDA dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	Kondisi Fisik jaringan drainase menyangkut jumlah, dimensi, jenis dan keadaan fisik suatu jaringan drainase mempengaruhi menurunnya luas kawasan banjir di Kota Balikpapan	100% - Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang SDA dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	Infrastruktur (penyehatan lingkungan) meliputi pengembangan dan pengelolaan air limbah, persampahan dan penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi layak (bobot :35)+ Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan (bobot :50)+Persentase Penyediaan Sarana Persampahan (bobot :15) / 3	Bidang Penyehatan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Kondisi Fisik Jaringan Jalan dan Jembatan menyangkut jumlah, dimensi, jenis permukaan jalan	persentase jalan dalam Kondisi mantab + persentase pelayanan jalan lingkungan ----- 2	Bidang Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Bangunan Gedung meliputi gedung-gedung perkantoran, perumahan ,	Jumlah bangunan yang ber SLF	Bidang Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			perhotelan , dan pusat perbelanjaan			
6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Persentase pelayanan Jasa konstruksi	Pelayanan Jasa Konstruksi dalam hal ini adalah SDM yang kompeten, Nilai Bobot capaian SIPJAKI dan badan usaha jasa konstruksi yang sudah berizin. Ketersediaan data jasa konstruksi dan pengawasan kegiatan konstruksi tanpa kecelakaan kerja	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (25%)+Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikasi (75%)	Bidang Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Pencapaian dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP pada Dinas Pekerjaan Umum yang dievaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penilaian APIP (Inspektorat Kota Balikpapan)	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2025

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029, Dinas Pekerjaan Umum juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor

188.46/033/DPU/2025 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dan drainase adalah kondisi meningkatnya kemampuan infrastruktur SDA dan sistem drainase dalam menyediakan layanan fungsional secara optimal, seperti pengendalian banjir, pengaturan air irigasi, penyediaan air baku, serta pengelolaan air permukaan dan limpasan, yang diukur melalui indikator teknis dan/atau cakupan wilayah yang terlindungi dan dilayani.	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota ----- X 100% Jumlah luasan rawan Banjir	Bidang SDA dan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan perpipaan yang terlindungi, adalah rasio antara jumlah	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N ----- X 100% Jumlah total Rumah Tangga kabupaten/kota	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			rumah tangga yang memperoleh layanan air minum aman dari SPAM terhadap total jumlah rumah tangga yang berada di seluruh kabupaten/kota dalam suatu wilayah administrasi, dikalikan 100%.			
3		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)	Persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman dan terlayani prasarana pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan berkelanjutan} + \text{Persentase Penyediaan Prasarana Pengelolaan Persampahan Regional}}{2}$	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
4	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	Persentase jumlah bangunan gedung yang memiliki izin dan berada dalam kondisi struktural dan fungsional yang baik, terawat, dan aman dibandingkan dengan jumlah total bangunan gedung yang ada dalam suatu wilayah atau area tertentu.	$\frac{\text{Persentase jumlah bangunan gedung yang memiliki izin (PBG dan SLF)}}{\text{Jumlah total bangunan gedung yang ada di kota Balikpapan}} \times 100\%$	Bidang Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota adalah persentase panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik} + \text{Kondisi sedang (km)}}{\text{Total panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)}} \times 100\%$	Bidang Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, berdasarkan hasil survei kondisi jalan menggunakan metode standar seperti International Roughness Index (IRI) atau metode visual dengan klasifikasi kondisi jalan			
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah hasil evaluasi pelaksanaan jasa konstruksi meliputi, pengawasan kesesuaian ijin berusaha konstruksi, pengawasan keselamatan kerja konstruksi, ketersediaan rantai pasok, sertifikasi tenaga teknis dan operator bidang konstruksi dan pembinaan BUJK	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Oleh DPUPRPERA Prov Kaltim	Bidang Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan kualitas	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku	Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
			perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi tersebut dalam periode satu tahun.			

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2025
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	60.87
2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	45.92
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98.31
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83.76
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	105
6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	35.51
7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	83.28

Sumber : Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Pada Tahun 2025 dilakukan perubahan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan ini sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Adapun perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian KinerjaTahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	60,94	85,25
2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	45,78	45,92
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98,15	98,31
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	94,91	83,85
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	123	123
6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	Persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	32,5	35,51
7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	79,58	79,75

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4	6	
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai	58,40	59,27
2	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,15%	52,37%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	%	94,39%	94,41%
4		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)	%	52,73%	53,11%
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,69%	56,81%
6	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Unit	83,85%	83,88%
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	11,45	13,98
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	Nilai	79,58	79,75

Sumber : Renstra Dinas Pekerjaan umum Tahun 2025-2029

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Pekerjaan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni sebesar **Rp. 958.649.597.732,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** dan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar **Rp. 1.050.008.972.287,- (Satu Triliun Lima Puluh Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)**

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	85,25%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,00	
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp 22.977.514.000,00	
				Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Rp 6.383.158.615,00	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. dan Pengaman Pantai	Rp 886.205.250,00	
				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Rp 2.595.336.000,00	
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rp 166.327.719,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 5.257.533.255,00	
1.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	98,31%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Rp 100.000.000,00	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp 956.459.100,00	
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 625.000.000,00	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp 14.955.528.000,00	
				Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp 11.097.403.350,00	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Rp 603.507.050,00	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Rp 900.000.000,00	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 81.024.275,00	
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp 6.793.192.372,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 1.814.747.050,00	
1.3	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	45,92%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 27.010.458.837,00	
				Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Rp 27.666.771.603,00	
				Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 42.810.843.885,00	
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rp 5.084.003.000,00	
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 37.526.233.160,00	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Rp 1.605.625.000,00	
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 15.912.133.999,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	123	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 68.674.582.894,16	
				Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 129.938.341.460,00	
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp 1.260.000.000,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	83,85%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 7.231.150.000,00	
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan	Rp 6.479.770.000,00	
				Penggantian Jembatan	Rp 9.700.000.000,00	
				Pembangunan Jalan	Rp 5.500.000.000,00	
				Rekonstruksi Jalan	Rp 166.978.035.000,00	
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 247.489.618.396,46	
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 8.500.000.000,00	
				Rehabilitasi Jembatan	Rp 4.500.000.000,00	
				Pembangunan Jembatan	Rp 21.950.000.000,00	
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 275.000.000,00	
				Rehabilitasi Jalan	Rp 89.357.933.239,38	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 1.000.000.000,00	
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 7.398.215.400,00	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan

1	2	3	4	5	6	7
1.6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	35,51%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rp 1.312.936.799,00	
				Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp 2.099.562.500,00	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 260.000.000,00	
1.7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	79,75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum	Rp 188.750.000,00	
				Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 19.363.278.732,00	

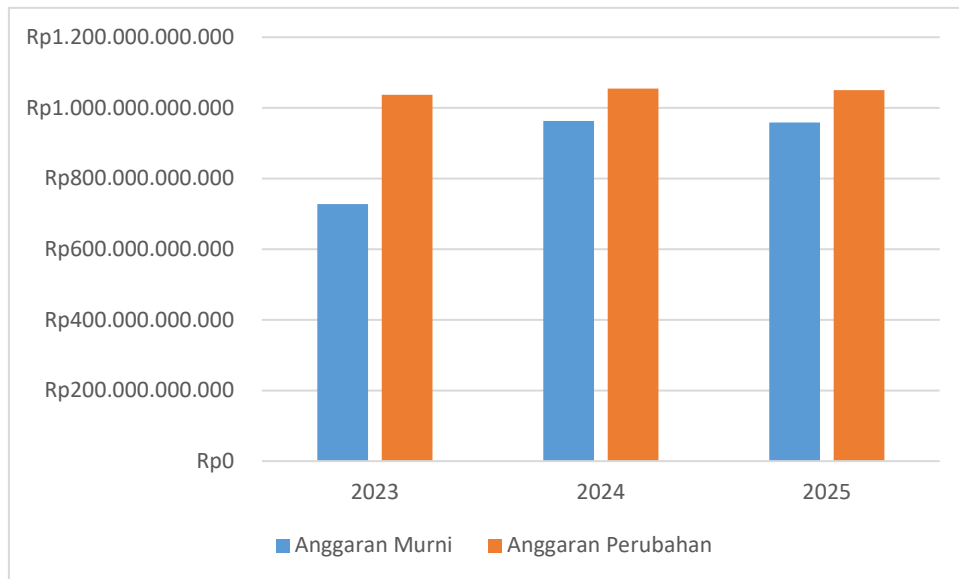
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Administrasi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 92.247.325,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 1.168.800.000,00	
				Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 50.000.000,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.600.000.000,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 601.355.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 151.149.250,00	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 50.000.000,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 248.173.503,00	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 125.000.000,00	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 150.000.000,00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 4.704.608.000,00	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.575.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.246.892.000,00	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.562.252.268,00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 81.200.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.050.000.000,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 486.115.000,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 400.000.000,00	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 350.000.000,00	
Jumlah					Rp 1.050.008.972.287,00	

Sumber: DPA Dinas Pekerjaan Umum 2025

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah grafik perbandingan anggaran tahun sebelumnya dan tahun ini.



Gambar 2. 1 Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 79,85 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2024
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	28,33
2	Pengukuran Kinerja	30	23.51
3	Pelaporan Kinerja	15	10.92
4	Evaluasi Kinerja	25	17,08
	Nilai Hasil Evaluasi	100	79,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB (Sangat Baik)	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Matriks tidak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja:	Kualitas pemanfaatan Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan masih perlu ditingkatkan;	Melakukan reviu atas penyelarasan target kinerja dari level pimpinan hingga staf untuk memastikan semua rencana mendukung hasil akhir yang sama.
		Perlu untuk terus melakukan survey internal kepada seluruh pegawai guna mengetahui tingkat pegawai dalam memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan maka survey yang dilakukan direkomendasikan tentang tujuan, sasaran serta target organisasi.	Menyusun jadwal monitoring capaian kinerja secara bulanan atau triwulanan untuk memastikan rencana tetap relevan dengan dinamika di lapangan
2	Pengukuran Kinerja:	Perlu untuk terus melakukan survey internal beserta laporannya kepada seluruh pegawai guna mengetahui tingkat kepedulian pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja;	Menyusun jadwal pelaksanaan survey kepedulian kinerja dan Membuat laporan hasil survey yang mencakup analisis tren kepedulian pegawai.
		Dalam pemberian Reward dan Punishment penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien agar dapat diimplementasikan;	Mereviu dan memperbarui Keputusan Pimpinan terkait kriteria pemberian penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>), Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas skema reward yang diterapkan
		Dalam penyajian laporan data kinerja yang dikumpulkan agar dapat lebih menjelaskan secara lengkap dan rinci.	Menyempurnakan format laporan kinerja dengan menyertakan narasi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
			target, Melampirkan data dukung yang lengkap dan valid untuk setiap poin capaian kinerja
3	Pelaporan Kinerja:	Perlu untuk terus melakukan survey internal beserta laporannya kepada seluruh pegawai guna mengetahui tingkat kepedulian terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja;	Melakukan survey kepuasan pengguna laporan kinerja kepada seluruh pegawai untuk mengukur efektivitas penyampaian informasi.
		Agar Dokumen Laporan Kinerja membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Daerah Provinsi Kaltim) / internasional (Benchmark Kinerja).	Mengidentifikasi instansi/daerah dengan kinerja terbaik
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja.	Menyusun rencana aksi (<i>Action Plan</i>) percepatan pencapaian target untuk indikator yang masih di bawah 100%
		Agar melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.	Membuat matriks monitoring tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu (LHE AKIP), Memastikan seluruh dokumen bukti dukung (<i>evidence</i>) perbaikan telah diunggah dan diverifikasi oleh tim internal

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi. LKJIP memuat gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis serta alat ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari perjanjian kinerja yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum.

Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	> 100%	Melebihi Target
2	= 100%	Tercapai/Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Tercapai

Sumber: Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya. Penyajian ini dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	85,25%	63,45%	74,43	Tidak Tercapai
1.2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	45,92%	43,69%	105,10	Melebihi Target
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98,31%	95,54%	97,18	Tidak Tercapai
1.4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83,85%	87,60%	104,47	Melebihi Target
1.5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	123	173	140,65	Melebihi Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	35,51%	36,69%	103,32	Melebihi Target
1.7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	79,75	79,85	100,13	Melebihi Target

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 dari setiap indikator **mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 103,61% di tahun 2025 dengan kategori penilaian realisasi kinerja “Melebihi Target”**.

Sementara untuk capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas renstra Dinas Pekerjaan umum Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/7 \times 100}$	8
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai	58,40	59,27	101,49	Melebihi Target
1.1	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,37	52,37	100	Tercapai / Sesuai Target

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	%	94,41	94,47	100,06	Melebihi Target
		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)	%	53,11	53,10	99,98	Tidak Tercapai
1.3	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,81	56,99	100,32	Melebihi Target
1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,88	84,51	100,75	Melebihi Target
1.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	13,98	14,20	101,57	Melebihi Target
1.6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	Nilai	79,85	79,85	100	Tercapai / Sesuai Target

Sumber : Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025

Capaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 dari setiap indikator **mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100,38% di tahun 2025 dengan kategori penilaian realisasi kinerja “Melebihi Target”**. Dengan demikian, secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan telah

melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Infrastruktur secara baik dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	54,02	100,01	54,41	100,28	60,43	105,13	81,74	138,12	63,45	104,25
1.2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	47,57	100,59	46,94	100,92	46,53	100,58	45,78	101,27	43,69	105,10
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	70,00	71,77	97,96	100,11	97,11	99,16	97,54	99,39	95,54	97,18
1.4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	74,41	94,29	81,18	101,54	79,92	98,36	84,91	106,24	87,60	104,58
1.5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	15,00	250,00	68,00	151,11	94,00	144,62	123,00	144,71	173	203,53
1.6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	27,92%	102,21	28,37%	97,43	29,73%	96,78	32,50%	98,16	36,69%	110,81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	77,31	--	78,86	--	79,58	97,05	79,58	94,74	79,85	92,85

Sumber: Evaluasi Renja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2016

Berdasarkan tabel 3.6, dijelaskan tentang perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air” dengan indikator Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 63,45 sehingga ada peningkatan 2,51 pada realisasi capaian dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 60,94 .
2. Capaian Sasaran Strategis “Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir” dengan Indikator Persentase penurunan luas genangan banjir pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 43,69 sehingga ada peningkatan penurunan persentase luas genangan banjir sebesar 2.09 realisasi capaian dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 45,78
3. Capaian Sasaran Strategis ”Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan” dengan Indikator Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 95,54 sehingga ada Penurunan 2 pada realisasi capaian dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 97,54
4. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan” dengan Indikator Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 87,60 sehingga ada peningkatan 2,69 pada realisasi capaian dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 84,91 .
5. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung” dengan Indikator Jumlah Bangunan yang memiliki SLF pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 173 (Seratus tujuh puluh tiga) Unit sehingga ada peningkatan pada realisasi capaian sebanyak 50 (lima puluh) unit dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 123 (Seratus dua puluh tiga) Unit.
6. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi” dengan Indikator Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 36,69 sehingga ada peningkatan 4,19 pada realisasi capaian dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 32.5
7. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 79,85 Nilai sehingga ada peningkatan 0,27 poin pada realisasi capaian dibandingkan Tahun 2024 yang memiliki realisasi capaian sebesar 79,58 Nilai.

Berikut disampaikan pula analisis capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029. Mengingat Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun 2025 menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan untuk periode sebelum 2025. Berikut table pengukuran realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 :

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	3				5		6		7	8	9	10
Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	—	—	—	—	—	—	—	—	58,40	59,27	101,49%
Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	—	—	—	—	—	—	—	—	52,37	52,37	100,00%
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	94,41	94,47	100,06%
	Persentase Infrastruktur Sanitasi	—	—	—	—	—	—	—	—	53,11	53,10	99,98%

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)											
Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	—	—	—	—	—	—	—	—	56,81	56,99	100,32%
Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	—	—	—	—	—	—	—	—	83,88	84,51	100,75%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	—	—	—	—	—	—	—	—	13,98	14,20	101,57%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Perangkat Daerah (Nilai)	77,31	—	78,86	—	79,58	97,05	79,58	94,74	79,85	79,85	100,00%

Sumber: Evaluasi Renja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.7, capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran yang dapat diperbandingan dengan tahun sebelumnya hanya nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum sementara untuk indikator lainnya tidak dapat diperbandikan karena belum ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama ditahun-tahun tersebut. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja Utama yang termuat dalam dokumen perencanaan untuk periode Renstra 2025-2029, sehingga capaian tahun 2025 menjadi *baseline* dokumen perencanaan strategis tahun 2025-2029.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada rencana strategis menyajikan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai selama periode perencanaan, serta memberikan gambaran tren kinerja terhadap target jangka menengah yang direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra ()
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9 =6/8*100
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	60,87	63,45	104,24	62,56	101
1.2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	45,92	43,69	105,10	45,48	100,97
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98,31	97,18	98,85	98,53	99

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra ()
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1.4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83,76	87,60	104,47	84,91	103
1.5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	105	173	164,76	125	138
1.6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	35,51	36,69	103,32	37,90	97
1.7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	-	79,85	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.8, Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026 untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air” dengan indikator “Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air” pada tahun 2025 memiliki realisasi sebesar 63.45% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 60,67% maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 104,24% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 62,56% maka meningkatnya kinerja Sumber daya Air telah tercapai sebesar 101%.
2. Capaian Sasaran Strategis “Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir” dengan Indikator Persentase penurunan luas genangan banjir pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 43,69% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 45,92% maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 105,10 dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 45,48% maka penurunan luas genangan banjir telah tercapai sebesar 100,97% .
3. Capaian Sasaran Strategis ”Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan” dengan Indikator Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik pada tahun 2025 memiliki realisasi

capaian sebesar 97,18% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 98,31% maka Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik belum tercapai dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 98,53% maka masih terdapat target 1,35% yang harus dicapai .

4. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan” dengan Indikator Persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 87,60% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 83,76% maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 104,47% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 84,91% maka Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik telah tercapai sebesar 103% .
5. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung” dengan Indikator Jumlah Bangunan yang memiliki SLF pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 173 (Seratus tujuh puluh tiga) Unit, jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebanyak 105 (seratus lima) unit maka indikator tersebut telah melebihi target sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 125 (seratus dua puluh lima) unit maka Indikator Jumlah Bangunan yang memiliki SLF telah melebihi target sebesar 138 (seratus tiga puluh delapan) unit .
6. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi” dengan Indikator Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 36,69% , jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 yaitu 35,51% maka indikator tersebut telah melebihi target sebesar 103,32% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yaitu 37,90% maka masih terdapat target 1,28% yang harus dicapai.
7. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 79,85 indikator terbut baru ditetapkan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 .

Selain itu, perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian

ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan UmumTerpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai	58,40	59,27	101	71,26	83,17
1.1	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,37	52,37	100	53,25	98,35
1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota ()	%	94,41	94,47	100	98,21	96,19
1.3		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi	%	53,11	53,10	100	56,77	93,54

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		aman dan berkelanjutan						
1.4	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,81	56,99	100,32	57,45	99,20
1.5	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,88	84,51	101	84,17	100,40
1.6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	13,98	14,20	102	55	25,82
1.7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Dinas Pekerjaan Umum (Nilai)	Nilai	79,85	79,85	100	80,15	99,63

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan tabel 3.9 tentang Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 untuk tujuan dan setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan “Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan UmumTerpadu dan berkualitas” dengan indikator “Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)” pada tahun 2025 memiliki realisasi sebesar 59,27 jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 58,40 maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 101 dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 71,26 maka tujuan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum masih terdapat target 11,99 poin yang harus dicapai.
2. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase” dengan indikator “Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota” pada tahun 2025 memiliki realisasi sebesar 52,37% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 52,37% maka capaiannya tercapai/sesuai target yaitu sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target

akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 53,25% maka masih terdapat 0,88% target yang harus dicapai.

3. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum” dengan Indikator “Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota” pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 94,47% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 94,41% maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 100,06 dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 98,21% maka masih terdapat 3,74% target yang harus dicapai. Dan “Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan” pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 53,11% maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 100,01 dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 56,77% maka masih terdapat target 3,66% yang harus dicapai.
4. Capaian Sasaran Strategis ” Meningkatkan keandalan bangunan gedung” dengan Indikator “Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi” pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 56,99% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 56,81% maka Indikator Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi telah melebihi target yaitu 100,32% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 57,45% maka masih terdapat target 0,46% yang harus dicapai .
5. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan” dengan Indikator “Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota” pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 84,51% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 sebesar 83,88% maka capaiannya telah melebihi target yaitu sebesar 101% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 84,17% maka Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik telah tercapai sebesar 100,40% .
6. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi” dengan Indikator ” Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi” pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 14,20 poin , jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 yaitu 13,98 poin maka indikator tersebut telah melebihi target sebesar 102 dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 55 maka masih terdapat target 40,8 poin yang harus dicapai.

7. Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan Indikator “Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum” pada tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 79,85 poin jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 yaitu 79,85 poin maka indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yaitu sebesar 100 dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 yaitu 80,15 poin maka masih terdapat target 0,3 poin yang harus dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, masih ada 6 indikator yang belum mencapai target akhir rencana dan 1 indikator yaitu “Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota” yang sudah melebihi target yaitu mencapai 100,40% .

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (benchmark kinerja) disusun untuk menilai posisi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun berjalan melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM), tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja Dinas Pekerjaan Umum berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dimaksud disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)/ Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kiner

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja 2025			
					Prov. Kaltim	Kota Bontang	Kab. Kutai Timur	Kab Berau
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	63,45				

3	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	43,69				
	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	97,18				
4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	87,60				
5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	173,00				
6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	36,69				
7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	79,85	66,60	81,80	52,90	70,05

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)/ Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kiner

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Benchmark Kinerja 2025			
					Prov. Kaltim	Kota Bontang	Kab. Kutai Timur	Kab Berau
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan UmumTerpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai	59,27				

2	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,37				
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	%	94,47				
		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan (%)	%	53,10				
4	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,99				
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	84,51				
6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	14,20				
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	79,85	66,60	81,80	52,90	70,05

Berdasarkan table 3.10 dan 3.11 disampaikan bahwa sasaran strategis yang dapat diperbandingkan dengan caoaian daerah lain yaitu sasaran ke **7 Meningkatkan kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. Hasil Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum

terhadap pengukuran kinerja, capaian Provinsi Kalimantan Timur sebesar **66,60** apabila dikonversikan ke dalam kategori evaluasi berada pada rentang **predikat B** (Baik). Predikat ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang perbaikan dalam hal efektivitas, efisiensi, serta konsistensi keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Secara komparatif, terdapat variasi capaian antar kabupaten/kota sebagai berikut:

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang (81,80)** berada pada kategori **A (Memuaskan)**, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas kinerja yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan adanya keterpaduan yang kuat antara dokumen perencanaan, indikator kinerja utama, penganggaran berbasis kinerja, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.
- **Dinas Pekerjaan Umum Balikpapan (79,85)** berada pada kategori **BB (Sangat Baik)**. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan secara konsisten dan mampu menghasilkan output dan outcome yang terukur, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan untuk mencapai predikat tertinggi.
- **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (66,60)** dengan predikat **B (Baik)** menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, namun optimalisasi kualitas indikator kinerja, penguatan cascading kinerja, serta peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi masih perlu ditingkatkan.
- **Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur (52,90)** berada pada kategori **CC (Cukup)**. Predikat ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP masih perlu penguatan secara mendasar, terutama pada aspek perencanaan berbasis hasil (result-oriented), penyusunan indikator yang SMART, serta konsistensi antara target dan realisasi kinerja.
- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau (70,05)** dan **Provinsi Kaltim (66,60)** berada pada kategori **B**. Predikat ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah berjalan dengan baik

Disparitas predikat SAKIP antar daerah menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat maturitas sistem manajemen kinerja.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis dalam subbab ini menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2025. Skala penilaian tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan misi dan visi dari predikat capaian kinerja Tidak Tercapai, Tercapai/Sesuai Tergat, dan Melebihi Target. Berikut ikhtisar capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025.

Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025/ Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	85,25	63,45	74	Terjadi kesalahan pada perhitungan Target Kinerja tahun 2025 sebesar 85,25% yang seharusnya 67,65% sehingga menyebabkan realisasi pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase target capaian pada Indikator Bidang SDA dan Drainase.	Memperbaiki perhitungan kinerja yang sesuai, Optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui penjadwalan ulang dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.	Menyusun perencanaan bertahap sesuai skala prioritas, memperkuat koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan.
1.2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	45,92	43,69	95	Kapasitas drainase di Kawasan permukiman padat belum memadai dan belum terintegrasi.	Penanganan darurat pada titik titik genangan prioritas, normalisasi dan pembersihan saluran drainase di lokasi rawan genangan.	Peningkatan kapasitas drainase dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir secara bertahap, penguatan program pemeliharaan rutin saluran drainase, pengembangan kolam retensi dan sumur resapan di kawasan rawan banjir.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	98,31	97,18	99	capaian kinerja belum sesuai target di pengaruhi oleh keterbatasan air baku, sehinggaa target spam tidak tercapai 100%, kurangnya keikutsertaan Masyarakat dalam pengelolaan air limba domestik, target dalam renja untuk persampahan terkait volume sampat terdapat kesalahan perbedaan target. Karena timbunan sampah di kota Balikpapan sesuai kajian yang ada sebanyak 600-700 ton/hari.	Peningkatan kualitas saran sanitasi di lokasi prioritas, pendampingan teknis kepada pengelola sarana di tingkat masyarakat.	Perluasan cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi lingkungan, penguatan oengawasan mutu dan pemeliharaan sarana prasaran.
1.4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	83,85	87,60	104	Perencanaan Program yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan prioritas, pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dan dukungan anggaran yang memadai.	Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan.	Mempertahankan pola perencanaan berbasis prioritas dan meningkatkan kualitas pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	123	173,00	141	Peningkatan kepatuhan pemilik bangunan terhadap pemenuhan SLF, proses perizinan dan pembinaan teknis berjalan lebih efektif.	Sosialisasi SLF dan Pendampingan teknis kepada pemilik Bangunan, percepatan pelayanan perizinan bangunan gedung.	Penguatan pengawasan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan, digitalisais proses pelayanan SLF.
1.6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	35,51	36,69	103	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyediaan jasa konstruksi, pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi berjalan efektif.	Pembinaan Pelaku usaha jasa konstruksi, Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.	Peningkatan kapasitas SDM konstruksi secara berkelanjutan, penguatan sistem pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.
1.7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	79,75	79,85	100	Penerapan manajemen kinerja yang konsisten dan terintegrasi, monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin.	Penyelarasan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan SAKIP serta peningkatan kualitas perencana berbasis kinerja.

Sumber: Evaluasi Renja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2021-2016

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025/ Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan UmumTerpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai	59,09	59,27	100,30	Dukungan anggaran relative memadai serta koordinasi lintas bidang dan lintas sektor berjalan efektif.	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk mengantisipasi kendala teknis.	Meningkatkan kualitas pengendalian program agar capaian kinerja tetap terjaga dan berkelanjutan.
1.1	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	52,37	52,37	100,00	Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan drainase dan normalisasi saluran berjalan baik.	Penanganan teknis pada lokasi prioritas melalui kegiatan rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir.	Melanjutkan penguatan infrastruktur pengendalian banjir secara bertahap di kawasan rawan lainnya.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	%	94,41	94,47	100,06	Peningkatan cakupan layanan air minum didukung oleh sinergi dengan penyelenggara layanan air minum.	Pengembangan jaringan distribusi air minum, fasilitasi sarana air minum layak pada wilayah dengan keterbatasan akses layanan perpipaan.	Perluasan cakupan pelayanan air minum layak, peningkatan kualitas layanan berkelanjutan operational system penyediaan air minum.
1.3		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan ()	%	53,11	53,10	99,98	Keterbatasan pemeliharaan di beberapa lokasi menyebabkan kinerja infrastruktur belum sepenuhnya optimal.	Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana sanitasi pada lokasi prioritas. Pendampingan teknis kepada pengelola sarana sanitasi berbasis masyarakat.	Peningkatan alokasi anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur sanitasi, penguatan sistem pengelolaan dan pengawasan sarana sanitasi agar berfungsi secara berkelanjutan.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.4	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	56,81	56,99	100,32	Meningkatnya kepatuhan pemilik bangunan dalam pemenuhan standar teknis bangunan dan SLF didukung pengawasan serta pembinaan teknis yang berjalan efektif.	Sosialisasi pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan percepatan pelayanan penerbitan SLF	Penguatan pengawasan teknis bangunan serta peningkatan pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan.
1.5	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	83,88	84,51	100,75	Pelaksanaan Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan berjalan sesuai perencanaan serta didukung alokasi anggaran dan pengendalian program yang memadai.	Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan pada ruas prioritas serta monitoring kondisi jalan secara berkala.	Peningkatan program pemeliharaan rutin dan periodik serta penguatan sistem monitoring kondisi jalan berbasis data.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	13,98	14,20	101,57	Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi serta meningkatnya kompetensi pelaku jasa konstruksi.	Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi sertifikat tenaga kerja konstruksi dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi jasa konstruksi	Penguatan kapasitas SDM Jasa Konstruksi secara berkelanjutan dan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
1.7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	79,75	79,85	100,13	Penerapan manajemen kinerja yang konsisten serta keselarasan antar perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja.	Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala serta pendampingan penyusunan dokumen SAKIP	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kinerja.

Sumber: Evaluasi Renja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

Secara keseluruhan, sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tahun 2025 pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 termasuk dalam kriteria penilaian **“Melebihi Target”** dengan nilai rata – rata sebesar 103,61 . Berikut hasil analisa pengukuran keberhasilan dan kegagalan capaian indikator dapat dilihat dibawah ini.

I. SASARAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase meningkatnya kinerja sumber daya air menunjukkan kriteria **“Tidak Tercapai”**, dengan nilai capaian kinerja 74,42% dan nilai realisasi kinerja 63,45% dimana telah memenuhi target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 (85,25%), faktor ketidak tercapaian indikator tersebut disebabkan karena kesalahan perhitungan target yang seharusnya 60,87% menjadi 85,25% . Jika target disesuaikan dengan perhitungan yang benar maka indikator tersebut tercapai dengan nilai capaian 104,23% . Adapun pencapaian hasil kinerja dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Telah terlaksananya kegiatan Peningkatan Bendali Telaga Sari, Bendali Blok II Korpri dan Bendali Gang Kantil
- b. Telah terlaksananya kegiatan Normalisasi Bendali Ampal Hulu yang dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Kodim 0905 Balikpapan
- c. Telah terlaksananya kegiatan Normalisasi saluran se kota Balikpapan

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada terutama terkait Kualitas Sumber Daya Air yang ada di Kota Balikpapan, adapun alternatif solusi yang dapat diberikan untuk bahan masukan pada sasaran strategis meningkatnya kualitas sumber daya air yaitu: melakukan pemeliharaan bangunan/prasarana air/sungai sebagai upaya menjaga kondisi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan secara berkelanjutan.

II. SASARAN 2: MENURUNNYA LUAS KAWASAN PERMUKIMAN TERGENANG BANJIR

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir air menunjukkan kriteria **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 105,10% dan nilai realisasi kinerja 43,69% dari target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 (45,92%). Beberapa pencapaian hasil kinerja dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

1. Telah terlaksananya Pembangunan Saluran tersier Beller (lanjutan), saluran tersier sepala (lanjutan) dan drainase Jl. Sultan Hasanuddin sepanjang ±3133 meter. Saluran sekunder berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran primer ke petak-petak tersier.
2. Terlaksananya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan di Jalan A. Yani, Sekunder Inhutani, saluran sekunder Depsos Bawah dan sekunder Balikpapan Baru sepanjang ±1987,3 meter, Kecamatan Balikpapan Tengah. Peningkatan drainase dilakukan sebagaimana upaya Dinas Perkerjaan Umum dalam mengurangi jumlah titik lokasi banjir dikawasan permukiman.

Adapun upaya Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan sasaran menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir yaitu:

1. Membangun tanggul atau pompa banjir di sepanjang aliran sungai yang rawan apabila terjadi banjir khususnya kawasan yang dekat dengan permukiman penduduk.
2. Membersihkan sungai, drainase, dan pembuatan sudetan untuk mengurangi sedimentasi yang dapat dilakukan pada saluran drainase.
3. Pembangunan dan peningkatan polder/kolam retensi dan Pembangunan dan peningkatan saluran drainase baik lingkungan maupun perkotaan

III. SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DI SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik menunjukkan predikat **“Tidak Tercapai”**, dengan capaian kinerja 97,18% dan nilai realisasi kinerja 95,54% dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 (98,31%). Adapun pencapaian hasil kinerja tersebut dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Adanya partisipasi aktif dari instansi dalam mendukung kegiatan sektor penyehatan lingkungan.
- b. Munculnya kesadaran masyarakat untuk terlibat mendukung sektor penyehatan lingkungan khususnya air minum dan sanitasi layak.
- c. Tidak tersedianya dengan cukup air baku yang menyebabkan pencapaian target distribusi air bersih kepada masyarakat tidak tercapai.

Upaya lain Dinas Pekerjaan Umum untuk menghadapi tantangan dan permasalahan Air Limbah, Air Minum dan Persampahan yang ada di Kota Balikpapan, adapun

alternatif solusi yang dapat diberikan sebagai bahan masukan pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan antara lain:

1. Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi lingkungan yang layak bagi semua orang termasuk pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendukung sanitasi, pengelolaan limbah yang efektif, dan penyediaan air bersih. Upaya ini harus difokuskan pada daerah yang masih kekurangan fasilitas sanitasi yang memadai.
2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya sanitasi melalui kampanye penyuluhan untuk menyampaikan informasi tentang praktik kebersihan yang benar, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, pemrosesan makanan yang aman, dan pentingnya menggunakan toilet yang higienis.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan sanitasi. Partisipasi aktif masyarakat dapat mencakup pembentukan kelompok masyarakat untuk merencanakan dan membangun fasilitas sanitasi.
4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

IV. SASARAN 4: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 104,47% dengan realisasi kinerja 87,6% yang memenuhi target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada tahun 2025 (83,85%). Adapun pencapaian hasil kinerja dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan Jembatan Jl. Mukmin Faisyal
- b. Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman
- c. Penataan Jalan MT Haryono (Lanjutan)
- d. Pembangunan Jembatan Atas Air (Lanjutan sampai TPI)
- e. Peningkatan Jalan di Lingkungan Balikpapan Baru
- f. Peningkatan Jalan Hasanuddin
- g. Peningkatan Jalan KPIK (Lanjutan)
- h. Peningkatan Jalan Prona 3 Tembus Perumahan HER Sepinggan
- i. Peningkatan Jalan Bhayangkara Kel. Graha Indah

j. Rehabilitasi Turap Jalan Km. 5,5-Km. 13 Kel. Karang Joang

Upaya lain Dinas Pekerjaan Umum untuk menghadapi tantangan dan permasalahan kemandirian Jalan yang ada di Kota Balikpapan, adapun alternatif solusi yang dapat diberikan sebagai bahan masukan pada indikator kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan antara lain:

1. Melakukan pemeliharaan rutin jalan yaitu merawat serta memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terjadi pada ruas – ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan seperti pemeliharaan bahu jalan, pemeliharaan system drainase, pemeliharaan/pembersihan tanaman di dalam rumija, penambalan lubang, pemeliharaan bangunan pelengkap, pemeliharaan perlengkapan jalan, dan pengerasan jalan tanpa penutup atau tanpa perkerasan.
2. Rehabilitasi atau pemeliharaan berkala jembatan untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya tahan seharusnya dimiliki jembatan mencakup kegiatan yaitu pengecatan ulang, pelapisan permukaan aspal, pembersihan menyeluruh jembatan, pemeliharaan pelekatan/landasan, penggantian siar muai (sambungan siar muai), memperbaiki bagian dan elemen kecil jembatan dan perbaikan pekerjaan pengalihan aliran sungai.

V. SASARAN 5: MENINGKATNYA KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja jumlah bangunan yang memiliki menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 140,65% dengan realisasi kinerja 173 unit dan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 sebanyak 123 unit. Salah satu penyebab yang mempengaruhi pencapaian hasil indikator kinerja tersebut adalah melakukan inovasi *cepat bang* yaitu inovasi yang menyediakan template standar gambar rumah Type 36 dan 45 untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial kepada masyarakat terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengurus perizinan bangunan melalui website Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh DPU dalam rangka meningkatkan keandalan bangunan gedung adalah dengan melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung beserta sarana dan prasarannya secara berkelanjutan agar bangunan selalu laik fungsi. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana tetap laik fungsi.

VI. SASARAN 6: MENINGKATNYA PELAYANAN JASA KONSTRUKSI

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase pelayanan jasa konstruksi menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 103,32% dengan realisasi kinerja 36,69% dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada tahun 2025 (35,51%). Hasil indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Belum terbentuknya Bidang Bina Konstruksi yang bertugas khusus dalam melayani Jasa Konstruksi dan Bina Konstruksi.
- b. Urusan Bina Konstruksi masih dilaksanakan oleh Tim Bina Konstruksi (setara seksi) dengan jumlah tenaga kerja kurang memadai atau hanya sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Berkaitan dengan belum terbentuknya bidang konstruksi serta masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas melayani jasa konstruksi dan masih belum memenuhi standar minimal mengakibatkan fungsi pengawasan belum dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Oleh karena itu, untuk mengatasi/ meminimalisir beberapa faktor di atas maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: Pembentukan Bidang Bina Konstruksi yang bertugas khusus melayani Pelayanan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi danMelakukan pendataan dan pengawasan tenaga kerja konstruksi di Kota Balikpapan

VII. SASARAN 7: MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 100,12% dengan realisasi kinerja senilai 79,85 dari target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 senilai (79,75). Salah satu penyebab yang mempengaruhi indikator kinerja tersebut adalah komunikasi dan koordinasi antar bidang di Dinas Pekerjaan Umum. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan, karenanya dibutuhkan peningkatan koordinasi tersebut untuk menyatukan pemahaman pelaksana pada pelaksanaan SAKIP ini. Adapaun upaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang dapat diberikan untuk membantu meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan:

- Membuat sistem manajemen pengelolaan data terintegrasi;
- Mengukur kinerja dan evaluasi dengan menetapkan indikator kinerja secara teratur untuk mengukur tingkat keberhasilan SAKIP.

Demikian pula pada sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Tahun 2025 pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 termasuk dalam kriteria penilaian **“Melebihi Target”** dengan nilai rata – rata sebesar 100,38% . Berikut hasil analisa pengukuran keberhasilan dan kegagalan capaian indikator dapat dilihat dibawah ini.

I. SASARAN 1: MENINGKATNYA KINERJA LAYANAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota menunjukkan kriteria **“ Tercapai/Sesuai Target”**, dengan nilai capaian kinerja 100% dan nilai realisasi kinerja 52,37% dimana telah memenuhi target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 (52,37%). Adapun pencapaian hasil kinerja dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Telah terlaksananya kegiatan Peningkatan Bendali Telaga Sari, Bendali Blok II Korpri dan Bendali Gang Kantil
- b. Telah terlaksananya kegiatan Normalisasi Bendali Ampal Hulu yang dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Kodim 0905 Balikpapan

c. Telah terlaksananya kegiatan Normalisasi saluran se kota Balikpapan

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada terutama terkait Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota, adapun alternatif solusi yang dapat diberikan untuk bahan masukan pada sasaran strategis Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota yaitu: melakukan pemeliharaan bangunan/prasarana air/sungai sebagai upaya menjaga kondisi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan, dan pengamanan secara berkelanjutan.

VIII. SASARAN 2: MENURUNNYA LUAS KAWASAN PERMUKIMAN TERGENANG BANJIR

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir air menunjukkan kriteria **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 105,10 dan nilai realisasi kinerja 43,69 dari target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 (45,92). Beberapa pencapaian hasil kinerja dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

1. Telah terlaksananya Pembangunan Saluran tersier Beller (lanjutan), saluran tersier sepala (lanjutan) dan drainase Jl. Sultan Hasanuddin sepanjang ±3133 meter. Saluran sekunder berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran primer ke petak-petak tersier.
2. Terlaksananya Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan di Jalan A. Yani, Sekunder Inhutani, saluran sekunder Depsos Bawah dan sekunder Balikpapan Baru sepanjang ±1987,3 meter, Kecamatan Balikpapan Tengah. Peningkatan drainase dilakukan sebagaimana upaya Dinas Perkerjaan Umum dalam mengurangi jumlah titik lokasi banjir dikawasan permukiman.

Adapun upaya Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan sasaran menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir yaitu:

3. Membangun tanggul atau pompa banjir di sepanjang aliran sungai yang rawan apabila terjadi banjir khususnya kawasan yang dekat dengan permukiman penduduk.
4. Membersihkan sungai, drainase, dan pembuatan sudetan untuk mengurangi sedimentasi yang dapat dilakukan pada saluran drainase.

5. Pembangunan dan peningkatan polder/kolam retensi dan Pembangunan dan peningkatan saluran drainase baik lingkungan maupun perkotaan

IX. SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DI SEKTOR PENYEHATAN LINGKUNGAN

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik menunjukkan predikat **“Tidak Tercapai”**, dengan capaian kinerja 97,18 dan nilai realisasi kinerja 95,54 dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 (98,31). Adapun pencapaian hasil kinerja tersebut dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

- d. Adanya partisipasi aktif dari instansi dalam mendukung kegiatan sektor penyehatan lingkungan.
- e. Munculnya kesadaran masyarakat untuk terlibat mendukung sektor penyehatan lingkungan khususnya air minum dan sanitasi layak.
- f. Tidak tersedianya dengan cukup air baku yang menyebabkan pencapaian target distribusi air bersih kepada masyarakat tidak tercapai.

Upaya lain Dinas Pekerjaan Umum untuk menghadapi tantangan dan permasalahan Air Limbah, Air Minum dan Persampahan yang ada di Kota Balikpapan, adapun alternatif solusi yang dapat diberikan sebagai bahan masukan pada sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan antara lain:

5. Meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi lingkungan yang layak bagi semua orang termasuk pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendukung sanitasi, pengelolaan limbah yang efektif, dan penyediaan air bersih. Upaya ini harus difokuskan pada daerah yang masih kekurangan fasilitas sanitasi yang memadai.
6. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya sanitasi melalui kampanye penyuluhan untuk menyampaikan informasi tentang praktik kebersihan yang benar, pentingnya mencuci tangan dengan sabun, pemrosesan makanan yang aman, dan pentingnya menggunakan toilet yang higienis.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi adalah kunci keberhasilan dalam meningkatkan sanitasi. Partisipasi aktif masyarakat dapat mencakup pembentukan kelompok masyarakat untuk merencanakan dan membangun fasilitas sanitasi.

8. Menjalin kerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

X. SASARAN 4: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 104,47 dengan realisasi kinerja 87,6 yang memenuhi target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada tahun 2025 (83,85). Adapun pencapaian hasil kinerja dipengaruhi beberapa kegiatan antara lain:

- a. Peningkatan Jembatan Jl. Mukmin Faisyal
- b. Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman
- c. Penataan Jalan MT Haryono (Lanjutan)
- d. Pembangunan Jembatan Atas Air (Lanjutan sampai TPI)
- e. Peningkatan Jalan di Lingkungan Balikpapan Baru
- f. Peningkatan Jalan Hasanuddin
- g. Peningkatan Jalan KPIK (Lanjutan)
- h. Peningkatan Jalan Prona 3 Tembus Perumahan HER Sepinggian
- i. Peningkatan Jalan Bhayangkara Kel. Graha Indah
- j. Rehabilitasi Turap Jalan Km. 5,5-Km. 13 Kel. Karang Joang

Upaya lain Dinas Pekerjaan Umum untuk menghadapi tantangan dan permasalahan kemandirian Jalan yang ada di Kota Balikpapan, adapun alternatif solusi yang dapat diberikan sebagai bahan masukan pada indikator kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan antara lain:

3. Melakukan pemeliharaan rutin jalan yaitu merawat serta memperbaiki kerusakan – kerusakan yang terjadi pada ruas – ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan seperti pemeliharaan bahu jalan, pemeliharaan system drainase, pemeliharaan/pembersihan tanaman di dalam rumija, penambalan lubang, pemeliharaan bangunan pelengkap, pemeliharaan perlengkapan jalan, dan pengerasan jalan tanpa penutup atau tanpa perkerasan.
4. Rehabilitasi atau pemeliharaan berkala jembatan untuk mengembalikan jembatan pada kondisi dan daya tahan seharusnya dimiliki jembatan mencakup kegiatan yaitu pengecatan ulang, pelapisan permukaan aspal, pembersihan menyeluruh jembatan, pemeliharaan pelekat/landasan,

penggantian siar muai (sambungan siar muai), memperbaiki bagian dan elemen kecil jembatan dan perbaiki pekerjaan pengalihan aliran sungai.

XI. SASARAN 5: MENINGKATNYA KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja jumlah bangunan yang memiliki menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 140,65 dengan realisasi kinerja 173 unit dan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 sebanyak 123 unit. Salah satu penyebab yang mempengaruhi pencapaian hasil indikator kinerja tersebut adalah melakukan inovasi *cepat bang* yaitu inovasi yang menyediakan template standar gambar rumah Type 36 dan 45 untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan melakukan kegiatan sosialisasi melalui media sosial kepada masyarakat terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengurus perizinan bangunan melalui website Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh DPU dalam rangka meningkatkan keandalan bangunan gedung adalah dengan melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya secara berkelanjutan agar bangunan selalu laik fungsi. Perawatan bangunan gedung adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana tetap laik fungsi.

XII. SASARAN 6: MENINGKATNYA PELAYANAN JASA KONSTRUKSI

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja persentase pelayanan jasa konstruksi menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 103,32 dengan realisasi kinerja 36,69 dan target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan pada tahun 2025 (35,51). Hasil indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Belum terbentuknya Bidang Bina Konstruksi yang bertugas khusus dalam melayani Jasa Konstruksi dan Bina Konstruksi.
- b. Urusan Bina Konstruksi masih dilaksanakan oleh Tim Bina Konstruksi (setara seksi) dengan jumlah tenaga kerja kurang memadai atau hanya sebanyak 3 (tiga) orang.

- c. Berkaitan dengan belum terbentuknya bidang konstruksi serta masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas melayani jasa konstruksi dan masih belum memenuhi standar minimal mengakibatkan fungsi pengawasan belum dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana amanat Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Oleh karena itu, untuk mengatasi/ meminimalisir beberapa faktor di atas maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut: Pembentukan Bidang Bina Konstruksi yang bertugas khusus melayani Pelayanan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melakukan pendataan dan pengawasan tenaga kerja konstruksi di Kota Balikpapan

XIII. SASARAN 7: MENINGKATNYA KUALITAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**, dengan nilai capaian kinerja 100,12 dengan realisasi kinerja senilai 79,85 dari target Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 senilai (79,75). Salah satu penyebab yang mempengaruhi indikator kinerja tersebut adalah komunikasi dan koordinasi antar bidang di Dinas Pekerjaan Umum. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan, karenanya dibutuhkan peningkatan koordinasi tersebut untuk menyatukan pemahaman pelaksana pada pelaksanaan SAKIP ini. Adapaun upaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan yang dapat diberikan untuk membantu meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan:

- Membuat sistem manajemen pengelolaan data terintegrasi;
- Mengukur kinerja dan evaluasi dengan menetapkan indikator kinerja secara teratur untuk mengukur tingkat keberhasilan SAKIP.

3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Dalam pencapaian kinerja, program/kegiatan dalam dokumen perencanaan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	101,45					
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	104,24	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	64,71	70,59	109
							Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	95,83	100	104

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	1	1,00	100
							Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dires torasi	3	7,50	250
							Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	1	3	300
							Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	2	3	150
							Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	1	1	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Operasi dan Pemeliharaan Polder/ Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang terpelihara	10	10	100
							Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	58,00	83,69	144
							Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	0,3	0,80	267
1.2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	105,10				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,85	56,31	105

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,56	74,82	105
							Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun	1000	5347	535
							Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Panjang Saluran drainase Lingkungan yang dibangun yang ditingkatkan	1000	4903	490
							Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	600	1987,30	331
							Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang direhab	714,5	714,5	100
							Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	2400	3133	131
							Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	2	12,00	600

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
								Drainase Perkotaan yang disusun			
							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	97900	97900,00	100
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	97,18	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota ()	100,6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	99,05	94,63	96

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	82,49	80,35	97
							Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	19	1	5
							Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2	4,00	200
							Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	400	168,00	42

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4					Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan ()	99,98	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	0,98	0,98	100
							Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	0,564	0,56	100
							Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	28050	60,00	0
							Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000	30,00	2

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun	11	7,00	64
							PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	97,39	94,00	97
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	92,76	11,40	12
							Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	100	7,51	8

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	10	10,00	100
							Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	400	309,00	77
							Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	7	3,00	43
1.5	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	104,58	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	100,75	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	91,47	92,63	101
							Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik	76,30	78,91	103

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
								Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik	93,00	96,35	103,60
							Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	34	42,00	124
							Pengawasan Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	50	53,42	107
							Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	2	2,00	100
							Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5,1	6,97	137
							Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	20	20,02	100
							Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	125	122,53	98

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	3	2,67	89
							Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14,5	17,01	117
							Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1	5,00	500
							Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	500	501,00	100
							Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14,5	17,01	117
							Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4	4,00	100
							Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10	11,00	110
1.6	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	203,52	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	100,32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	persentase bangunan yang memiliki ijin	93,90	93,53	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	persentase bangunan layak teknis	96,66	85,75	89
							Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	34	34	100
							Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300	740,00	247
1.7	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	110,81	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan n Jasa Konstruksi	101,57	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	1,00	100
							Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Presentase tenaga operator/teknisi/a nalisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10,81	0,11	101

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	500	494,00	99
							Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100	130,00	130
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia	60	0,60	100
							Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	2	2,00	100
1.8	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	100,13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Perangkat Daerah (Nilai)	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	86	80,00	93

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPU	83,28	84,00	101
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2	2,00	100
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan	85,9	85,90	100
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	70,00	100
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	83,48	83,48	100
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	100	100,00	100
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	95	95,00	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	85,65	85,70	100
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	60,00	100
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	138	138,00	100
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	900	900,00	100
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	90	90,00	100
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	15	15,00	100
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	30	30,00	100
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1,00	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah implementasi SPBE pada SKPD	2	2,00	100
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	82,15	82,20	100
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan	5	5,00	100
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	5	5,00	100
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,6	85,65	100
							Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	60	100
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60,00	60,00	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,20	81,25	100
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	6,00	6,00	100
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	58,00	58,00	100
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan yang dipelihara	80,00	118,00	148
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	1,00	2,00	200

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,00	3,00	100

Sumber : Data Olahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Keterangan :

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 menuju Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Berikut adalah penjelasan dari **Tabel 3.13** mengenai analisa program/kegiatan yang menentukan nilai ketercapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025.

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Dari data tabel 3.13, diketahui melalui program pengelolaan sumber daya air dengan kegiatan pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota, mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu **persentase meningkatnya kinerja Sumber Daya Air** dengan capaian sebesar 100,01%. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan pada rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu **rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota** dengan capaian sebesar 100%.

Adapun Pekerjaan yang berdampak pada pencapaian target sasaran antara lain:

- a. Penanganan Bendali Telaga Sari
- b. Peningkatan Bendali Blok I
- c. Pembangunan Bendali Gg.Kantil
- d. Normalisasi Bendali Ampal Hulu
- e. Normalisasi Bendali dan Saluran sekota Balikpapan
- f. Pembangunan Jaringan D.I Binjai
- g. Peningkatan Saluran Sekunder Sepinggian Baru (Lanjutan)
- h. Peningkatan A. Yani
- i. Peningkatan Saluran Sekunder Inhutani
- j. Peningkatan Saluran Sekunder Depsos Bawah
- k. Peningkatan Saluran Sekunder PE Kum
- l. Peningkatan Saluran Tersier Wonorejo
- m. Pembangunan Saluran Tersier Beller (Lanjutan)
- n. Pembangunan Saluran Tersier Sepala (Lanjutan)

- o. Pembangunan Saluran Tersier Bangun Reksa (Lanjutan)
- p. Pembangunan Saluran Tersier SD Negeri 24
- q. Pembangunan Drainase Jl. Sultan Hasanuddin (Lanjutan)

Untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Balikpapan, Pemerintah Kota (PEMKOT) Balikpapan melakukan peningkatan Bendali Blok II, Bendali Telaga Sari dan Bendali Gg Kantil. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Drainase selama tahun 2025.



Gambar 3. 1 Bendali Telaga Sari

Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Kegiatan pada indikator ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Balikpapan dan berkaitan erat dengan indikator meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air. Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Drainase selama tahun 2025. Berikut adalah foto dokumentasi pelaksanaan program terkait.



Gambar 3. 2 Saluran Sekunder Inhutani

Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025



Gambar 3. 3 Pengerukan Sedimen Saluran/Normalisasi
Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Perkerjaan Umum
Kota Balikpapan, 2025

2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Dari data tabel 3.13, diketahui bahwa melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu **persentase infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik** dengan capaian sebesar 97,18% Program dan kegiatan tersebut juga mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan pada rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu **Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota** dengan capaian sebesar 100,06% dan **Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan** dengan capaian sebesar 99,98%.

Adapun pekerjaan yang berdampak pada pencapaian target sasaran antara lain:

- Pembangunan instalasi pemanenan air hujan
- Peningkatan Jaringan SPAM Sumur Dalam Kel.Gunung Sari Ulu
- Peningkatan Landasan Kontainer se-Kota Balikpapan
- Peningkatan TPS se-Kota Balikpapan

- Pembangunan TPST Kelurahan Karang Joang (KM.12) (Lanjutan)
- Pembangunan TPST / PDU Kelurahan Graha Indah
- Peningkatan MRF Gunung Bahagia

Kegiatan pada indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan layanan sanitasi khususnya air minum yang berkelanjutan di Kota Balikpapan. Sanitasi yang dikelola dengan aman diakui sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesehatan, gizi dan produktivitas masyarakat, serta merupakan target dari Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-enam. Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) selama tahun 2025.



Gambar 3. 4 Pembangunan SPALDS Hibah Masyarakat
 Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Perkerjaan Umum
 Kota Balikpapan, 2025

3. Program Penyelenggaraan Jalan

Dari data tabel 3.13, diketahui bahwa melalui program penyelenggaraan jalan mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu **persentase meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan** sebesar 104,47%. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan pada rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu **tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota** dengan capaian sebesar 84,51%. Sementara itu untuk capaian program penyelenggaraan jalan adalah 92.63%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target sasaran antara lain:

- Peningkatan Jembatan depan Dome

- Pembangunan Jalan Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman
- Penataan Jalan MT Haryono (Lanjutan)
- Pembangunan Jembatan Atas Air (Lanjutan sampai TPI)
- Peningkatan Jalan di Lingkungan Balikpapan Baru
- Peningkatan Jalan Hasanuddin
- Peningkatan Jalan KPIK (Lanjutan)
- Peningkatan Jalan Prona 3 Tembus Perumahan HER Sepingga
- Peningkatan Jalan Bhayangkara Kel. Graha Indah
- Rehabilitasi Turap Jalan Km. 5,5-Km. 13 Kel. Karang Joang

Kegiatan pada indikator ini bertujuan sebagai meningkatkan sistem transportasi darat sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk berpergian, mengoptimalkan mobilitas barang dan orang, serta meningkatkan konektivitas antar daerah/wilayah. Pada dasarnya, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki fungsi utama untuk memperlancar arus barang dan penduduk dari satu tempat ke tempat lain serta arus barang dari sumber – sumber produksi ke pusat pemasaran. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi bisnis dan daya saing ekonomi antar masyarakat. Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Jalan dan Jembatan (JJ) selama tahun 2025.



Gambar 3. 5 Jl. Mukmin Faisyal Tembus Mulawarman

Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Perkerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

4. Program Penataan Bangunan Gedung

Dari data tabel 3.13, diketahui bahwa melalui program penataan bangunan gedung dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung mendukung indikator kinerja utama yang telah

ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu **persentase meningkatnya keandalan bangunan gedung** telah tercapai sebesar 140,63%. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan pada rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu **Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi** dengan capaian sebesar 56,99%. Indikator-indikator tersebut dapat terlaksana melalui program penataan bangunan gedung dengan capaian 93,53 dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dengan capaian 85,75% . Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target sasaran antara lain:

- Pembangunan Gedung Gabungan DP3 dan Disdag
- Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahap III
- Penataan Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota di Jalan Ruhui Rahayu 1
- Peningkatan Gedung Stadion BatakanPembangunan Parkir Bus Pemerintah Kota Balikpapan
- Interior Gedung Kantor DPRD

Kegiatan pada indikator ini bertujuan mengkaji bangunan gedung yang telah selesai dibangun atau telah berdiri dapat berfungsi secara maksimal. Keandalan bangunan gedung tidak hanya kondisi fisik bangunan tetapi juga meliputi perlengkapannya yang dapat menjamin keselamatan, fungsi, dan kenyamanan suatu bangunan gedung dan lingkungan selama masa pakai gedung tersebut. Selain itu, keandalan suatu bangunan juga menjadi tolak ukur bagaimana bangunan telah melewati pengujian secara teknis dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Gedung Pemerintahan (GP) selama tahun 2025.



Gambar 3. 6 Pembangunan Gedung Gabungan DP3 dan Disdag
Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Perkerjaan Umum
Kota Balikpapan, 2025

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dari data tabel 3.13, diketahui bahwa pada program pengembangan jasa konstruksi dengan 2 (dua) kegiatan yaitu penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota mendukung indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu **persentase pelayanan Jasa konstruksi** sebesar 36,69%. Program dan kegiatan tersebut juga mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama yang telah ditetapkan pada rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu **Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dengan capaian sebesar 14,20%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target sasaran antara lain:

- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diikuti oleh 500 Orang Tenaga Kerja dari Kota Balikpapan dengan Narasumber yang berasal dari Lembaga Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Kegiatan pada indikator ini bertujuan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa kontrsuksi yang berkualitas. Pengadaan jasa konstruksi memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah. Pekerjaan ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Bidang Gedung Pemerintah (GP) selama tahun 2025.



Gambar 3. 7 Dokumentasi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi Tahun 2025

Sumber : Tim Pengelola Data, Informasi dan Media Dinas Perkerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada data tabel 3.13, adalah program yang mendukung indikator kinerja **Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum** capaian pada indikator tersebut adalah 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 6 (enam) Sub kegiatan yaitu: Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dengan capaian 70% ; Administrasi Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum sebesar 100% ; Administrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum sebesar 100% ; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100% ; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% ; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100% . Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target sasaran antara lain:

- Pembayaran Gaji ASN
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran seperti Meja, Kursi, Sofa, Komputer, Printer, dan Smart Board
- Pengadaan kendaraan dinas operasional seperti, mobil tangki, mesin asphalt mixing plant, pengadaan dump truk, dan Mobil Alphoment.
- Pemeliharaan gedung kantor, seperti pemeliharaan taman, jaringan listrik, jaringan internet dan perbaikan pantry.

- Pengadaan perlengkapan kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Fotocopy, Barang Cetak dan Bahan pembersih

Kegiatan pada indikator ini bertujuan membantu peningkatan kualitas pelayanan publik seperti misalnya aduan dari masyarakat terkait adanya penumpukan sedimen pada saluran atau bendali dan merupakan salah satu upaya dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan untuk mengirimkan alat berat tersebut menuju lokasi yang memerlukan untuk dilakukan pengerukan sedimen. Selain itu, dengan adanya pengadaan alat berat dan kendaraan tersebut diharapkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terutama operator alat berat untuk mengoperasikan alat berat tersebut.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2.7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat didalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 321 (tiga ratus dua puluh satu) orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan hanya didukung oleh 56 (lima puluh enam) orang PNS dan 87 (delapan puluh tujuh) PPPK Penuh Waktu .

Data rekapitulasi pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas		1
2	Sekretaris	1	
3	Kasubbag Umum	1	
4	Kasubbab Keuangan		1
5	Bendahara Pengeluaran		1
6	Perencana Ahli Muda		1
7	Kepala Bidang Gedung Pemerintah		1

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
8	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	1	
9	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman		1
10	Kepala Bidang SDA dan Drainase	1	
11	Kepala UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan	1	
12	Kasubbag TU UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan	1	
13	Kepala UPTD Drainase Dan Bozem	1	
14	Kasubbag TU UPTD Drainase Dan Bozem	1	
15	Analisis Jalan dan Jembatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan		1
16	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	1	
17	Pemelihara Sarana dan Prasarana	19	
18	Pemelihara Sarana dan Prasarana UPTD Perawatan Jalan dan Jembatan	1	
19	Pengadministrasi Umum	6	4
20	Pengawas Bangunan dan Gedung	1	
21	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	1	
22	Teknik Jalan Dan Jembatan Ahli Pertama		1
23	Teknik Pengairan Ahli Muda		1
24	Teknik Pengairan Ahli Pertama		3
25	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	1
26	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam diagram/ tabel berikut :

Tabel 3. 15 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Pekerjaan Umum menurut tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	SMA/ D1/D2	12	37
2	D3	-	2
3	D4/S1	20	15
4	S2	-	5

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang, kemudian diikuti oleh pendidkan D3 berjumlah 2 (dua) Orang, Pendidikan D4/S1 35 Orang dan Pendidikan S2 5 (lima) Orang Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak.

3.2.7.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum. Data tersebut menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah pada tahun pelaporan. Penyajian data ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi. Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16 Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai

No.	SARANA & PRASARANA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI	
		Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)	Jumlah Aset yang dimiliki Tidak dipakai (Rp)
1.	Tanah	3.750 m ²	
2.	Bangunan Tempat Kerja	1.016 m ²	
3.	Kendaraan Roda 2	18 unit	
4.	Kendaraan Roda 4	19 unit	
5.	Kendaraan Roda 6	12 unit	

No.	SARANA & PRASARANA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI	
		Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)	Jumlah Aset yang dimiliki Tidak dipakai (Rp)
6.	Alat Berat	23 unit	
7.	Air Conditioner	22 unit	
8.	Penghancur Kertas	2 unit	
9.	Kamera Digital	5 unit	
10.	CCTV	1 paket	
11.	Dispenser	8 unit	
12.	Filling Kabinet	5 unit	
13.	GPS	6 unit	
14.	Handy Talky	20 unit	
15.	Komputer	59 unit	
16.	Printer	45 unit	
17.	Laptop	20 unit	
18.	Kursi Kerja Staf	82 unit	
19.	Meja Kerja Staf	82 unit	
20.	Kursi Kerja Pimpinan	6 unit	
21.	Meja Kerja Pimpinan	6 unit	
22.	Televisi	6 unit	
23.	Brankas	2 unit	
24.	Kursi Tamu	4 unit	
26.	Lemari	37 unit	
27.	LCD Infocus	2 unit	
28.	Meja Resepsionis	2 unit	
29.	Smart Board	6 unit	
30.	Sound System	2 unit	
31.	Rak Kayu	10 unit	
32.	Gorden	7 set	
33.	Mesin Absensi	1 unit	
34.	Mesin Hitung	9 Unit	
35.	Genset	1 unit	
36.	Hammer Test	1 unit	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3.2.7.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah pada tahun pelaporan. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja. Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini disajikan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari rumus perhitungan dibawah ini:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3. 17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air	%	Bidang SDA dan Drainase	85,25	63,45	74,43	38.316.074.839	36.019.124.230	94,01	-26,3
1.2	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	Persentase penurunan luas genangan banjir	%	Bidang SDA dan Drainase	45,92	43,69	95,14	157.616.069.484	151.129.994.158	95,88	-0,78
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan)	Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	%	Bidang PLP	98,31	97,00	98,67	37.926.861.197	30.818.246.783	81,26	17,65
1.4	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	Bidang JJ	83,85	87,60	104,47	576.359.722.036	567.166.618.850	98,40	5,81
1.5	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Jumlah Bangunan yang memiliki SLF	Unit	Bidang GP	123,00	173,00	140,65	199.872.924.354	182.227.688.856	91,17	35,18
1.6	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	persentase pelayanan Jasa konstruksi	%	Bidang GP	35,51	36,69	103,32	3.672.499.299	3.235.222.846	88,09	14,74
1.7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum	Nilai	LHP LKJIP Tahun 2025	79,75	79,85	100,13	36.244.821.078	30.422.707.492	83,94	16,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Terpadu dan berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum (Indeks)	Nilai	DPU Kota Balikpapan	59,09	59,27	100,30	1.050.008.972.287,00	1.001.019.603.215,12	95,33	4,96	Efisien
1.1	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	Bidang SDA dan Drainase	52,37	52,37	100,00	195.932.144.323,00	187.149.118.387,92	95,52	4,48	Efisien
1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota ()	%	Bidang PLP	94,41	94,47	100,06	1.681.459.100,00	1.282.853.421,00	76,29	23,75	Efisien
1.3		Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan ()	%	Bidang PLP	53,11	53,10	99,98	36.245.402.097,00	29.535.393.361,94	81,49	18,50	-
1.4	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi	%	Bidang GP	56,81	56,99	100,32	199.872.924.354,16	182.227.688.856,49	91,17	9,12	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1.5	Meningkatnya kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	Bidang JJ	83,88	84,51	100,75	576.359.722.035,84	567.166.618.849,77	98,40	2,33	Efisien
1.6	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Nilai	Bidang GP	13,98	14,20	101,57	3.672.499.299,00	3.235.222.846,00	88,09	13,27	Efisien
1.7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akip Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	LHP LKjIP Tahun 2025	79,75	79,85	100,13	36.244.821.078,00	30.422.707.492,00	83,94	16,17	Efisien

Keterangan:

1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian ≥ 100 , meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025

Berdasarkan tabel 3.17 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 diketahui terdapat 8 (delapan) Indikator yang capaian kinerjanya juga mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
- 2) Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Dinas Pekerjaan Umum tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
- 3) Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.
- 4) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada

indikator-indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a) Keterbatasan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
- b) Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
- c) Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 1 (satu) Indikator yang mengacu dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

- a. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
- b. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
- c. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.
- d. Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

6.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 95,33% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 1.050.008.972.287,00 (Satu Triliyun Lima Puluh Miliar Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut:

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	38.316.074.839,00	36.019.124.230,10	94,01
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.316.074.839,00	36.019.124.230,10	94,01
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.058.541.584,00	30.977.620.269,10	93,71
	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.858.499,00	95,72
	Normalisasi/Restorasi Sungai	22.977.514.000,00	22.617.522.469,10	98,43
	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	6.383.158.615,00	5.541.267.735,00	86,81
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. dan Pengaman Pantai	886.205.250,00	301.368.718,00	34,01
	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	166.327.719,00	166.327.718,00	100,00
	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	2.595.336.000,00	2.303.275.130,00	88,75
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.257.533.255,00	5.041.503.961,00	95,89
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	5.257.533.255,00	5.041.503.961,00	95,89

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kualitas infrastruktur di sektor penyehatan lingkungan	37.926.861.197,00	30.818.246.782,94	81,26
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.681.459.100,00	1.282.853.421,00	76,29
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.681.459.100,00	1.282.853.421,00	76,29
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	100.000.000,00	96.737.818,00	96,74
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	956.459.100,00	650.911.306,00	68,05
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	625.000.000,00	535.204.297,00	85,63
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	26.656.438.400,00	21.854.513.374,04	81,99
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	26.656.438.400,00	21.854.513.374,04	81,99
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	14.955.528.000,00	10.553.058.085,00	70,56
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.097.403.350,00	10.703.770.242,04	96,45
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	603.507.050,00	597.685.047,00	99,04
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.588.963.697,00	7.680.879.987,90	80,10
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.588.963.697,00	7.680.879.987,90	80,10
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	900.000.000,00	799.902.723,40	88,88
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem	81.024.275,00	72.662.431,00	89,68

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.793.192.372,00	5.163.734.643,00	76,01
	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.814.747.050,00	1.644.580.190,50	90,62
	Menurunnya luas kawasan permukiman tergenang banjir	157.616.069.484,00	151.129.994.157,82	95,88
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	157.616.069.484,00	151.129.994.157,82	95,88
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	157.616.069.484,00	151.129.994.157,82	95,88
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	27.010.458.837,00	26.320.129.330,00	97,44
	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	27.666.771.603,00	27.279.741.823,00	98,60
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	42.810.843.885,00	40.248.711.380,82	94,02
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	5.084.003.000,00	4.984.057.576,00	98,03
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	37.526.233.160,00	36.998.790.228,00	98,59
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.605.625.000,00	1.474.826.834,00	91,85
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	15.912.133.999,00	13.823.736.986,00	86,88
	Meningkatnya keandalan bangunan gedung	199.872.924.354,16	182.227.688.856,49	91,17
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	199.872.924.354,16	182.227.688.856,49	91,17
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	199.872.924.354,16	182.227.688.856,49	91,17
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	68.674.582.894,16	59.974.493.495,49	87,33
	Pembangunan. Pemanfaatan. Pelestarian dan	129.938.341.460,00	121.504.558.462,00	93,51

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB). Tim Profesi Ahli (TPA). Tim Penilai Teknis (TPT). Penilik. dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.260.000.000,00	748.636.899,00	59,42
	Meningkatnya infrastruktur Jalan dan jembatan	576.359.722.035,84	567.166.618.849,77	98,40
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	576.359.722.035,84	567.166.618.849,77	98,40
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	576.359.722.035,84	567.166.618.849,77	98,40
	Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.231.150.000,00	5.509.930.680,00	76,20
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan	6.479.770.000,00	5.838.584.983,00	90,10
	Penggantian Jembatan	9.700.000.000,00	9.600.127.148,14	98,97
	Pembangunan Jalan	5.500.000.000,00	5.493.980.400,00	99,89
	Rekonstruksi Jalan	166.978.035.000,00	164.756.113.073,54	98,67
	Pemeliharaan Berkala Jalan	247.489.618.396,46	245.410.252.318,53	99,16
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	8.500.000.000,00	8.407.045.252,20	98,91
	Rehabilitasi Jembatan	4.500.000.000,00	4.477.851.613,00	99,51
	Pembangunan Jembatan	21.950.000.000,00	21.791.566.670,97	99,28
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	275.000.000,00	269.055.305,00	97,84
	Rehabilitasi Jalan	89.357.933.239,38	88.887.981.556,39	99,47
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000,00	925.457.691,00	92,55
	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.398.215.400,00	5.798.672.158,00	78,38
	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	3.672.499.299,00	3.235.222.846,00	88,09
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.672.499.299,00	3.235.222.846,00	88,09
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.412.499.299,00	3.005.861.294,00	88,08

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	1.312.936.799,00	946.391.294,00	72,08
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	2.099.562.500,00	2.059.470.000,00	98,09
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000,00	229.361.552,00	88,22
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	260.000.000,00	229.361.552,00	88,22
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	36.244.821.078,00	30.422.707.492,00	83,94
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.244.821.078,00	30.422.707.492,00	83,94
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.750.000,00	178.197.300,00	94,41
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	188.750.000,00	178.197.300,00	94,41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.363.278.732,00	15.310.728.611,00	79,07
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.363.278.732,00	15.310.728.611,00	79,07
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.261.047.325,00	1.160.899.286,00	92,06
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	92.247.325,00	86.402.400,00	93,66
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.168.800.000,00	1.074.496.886,00	91,93
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.975.677.753,00	2.808.823.412,00	94,39
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	47.427.000,00	94,85
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.600.000.000,00	1.523.841.200,00	95,24
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	601.355.000,00	557.128.300,00	92,65
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.149.250,00	113.783.260,00	75,28
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	48.706.000,00	97,41

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.173.503,00	243.712.152,00	98,20
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125.000.000,00	124.597.500,00	99,68
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000,00	149.628.000,00	99,75
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.279.608.000,00	5.973.036.907,00	95,12
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.704.608.000,00	4.439.849.407,00	94,37
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.575.000.000,00	1.533.187.500,00	97,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.809.144.268,00	3.208.108.079,00	84,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1.246.892.000,00	1.126.454.530,00	90,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.562.252.268,00	2.081.653.549,00	81,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.367.315.000,00	1.782.913.897,00	75,31
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.200.000,00	52.937.736,00	65,19
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.050.000.000,00	557.720.901,00	53,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	486.115.000,00	424.494.250,00	87,32
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	399.079.410,00	99,77
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000,00	348.681.600,00	99,62
	Total	1.050.008.972.287,00	1.001.019.603.215,12	95,33

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tahun 2025 menggambarkan pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis “Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air dengan indikator Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air” melalui “Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)” memiliki realisasi capaian 74,43 % sehingga termasuk kategori capaian “Tidak Tercapai”.
- 2) Sasaran Strategis “Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Tergenang Banjir dengan indikator Persentase penurunan luas genangan banjir” melalui “Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase” memiliki realisasi capaian 105,10 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
- 3) Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur di Sektor Penyehatan Lingkungan dengan indikator Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik” melalui 3 (tiga) “Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah” memiliki realisasi capaian 97,18% sehingga termasuk kategori “Tidak Tercapai”
- 4) Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan indikator persentase Infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik” melalui 2 (dua) “Program Pengembangan Permukiman dan Program Penyelenggaraan Jalan” memiliki realisasi capaian 104,47% sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
- 5) Sasaran Strategis “Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung dengan indikator Jumlah Bangunan yang memiliki SLF” melalui “Program Penataan

Bangunan Gedung” memiliki realisasi capaian 140,65 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.

- 6) Sasaran Strategis “Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi dengan indikator persentase pelayanan Jasa konstruksi” melalui “Program Pengembangan Jasa Konstruksi” memiliki realisasi capaian 103,32 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
- 7) Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum” dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum melalui “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” memiliki realisasi capaian 100,12% sehingga termasuk kategori “Melebihi Target”.

Sedangkan untuk Matrik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis serta 7 (Tujuh) Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase dengan indikator Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota” melalui 2 (dua) “Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase” memiliki realisasi capaian 100% sehingga termasuk kategori capaian “Tercapai/Sesuai Target”.
- 2) Sasaran Strategis ” Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum” melalui 2 (dua) indikator yaitu :
 - a. “Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota” melalui “Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum” memiliki realisasi capaian 100,06% sehingga termasuk kategori “Melebihi Target”

- b. “Persentase Infrastruktur Sanitasi dalam kondisi aman dan berkelanjutan” melalui 2 (dua) “Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah” memiliki realisasi capaian 99,98% sehingga termasuk kategori “Tidak Tercapai”
- 3) Sasaran Strategis “Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan dengan indikator Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota” melalui “Program Penyelenggaraan Jalan” memiliki realisasi capaian 100,75 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
- 4) Sasaran Strategis “Meningkatnya Keandalan Bangunan Gedung dengan indikator Persentase Bangunan Gedung yang Layak Fungsi” melalui “Program Penataan Bangunan Gedung” memiliki realisasi capaian 100,31% sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
- 5) Sasaran Strategis “Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi” melalui “Program Pengembangan Jasa Konstruksi” memiliki realisasi capaian 101,57 % sehingga termasuk kategori capaian “Melebihi Target”.
- 6) Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum melalui “Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” memiliki realisasi capaian 100 % sehingga termasuk kategori “Tercapai/Sesuai Target”.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 7 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang baik dalam mencapai target akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dengan rata – rata capaian senilai 103,61 atau dikategorikan “Melebihi Target”. Berikut adalah strategi untuk mengatasi isu permasalahan untuk meningkatkan kinerja antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dengan melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dan pembinaan mental spiritual.

Maka dari itu, dengan tersusunnya LKJIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif membangun Kota Balikpapan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Balikpapan



Ir. RITA, S.T., M.Si